

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK
MENCEGAH *FRAUD*
(Studi pada Inspektorat Kabupaten OKU)**

SKRIPSI



**Nama : Asri Ayu Arimetika
NIM : 222015065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK
MENCEGAH *FRAUD*
(Studi pada Inspektorat Kabupaten OKU)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Asri Ayu Arimetika
NIM : 222015065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asri Ayu Arimetika

NIM : 22 2015 065

Progam Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,



Asri Ayu Arimetika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 dalam
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja untuk Mencegah *Fraud*
(Studi pada Inspektorat Kabupaten OKU)
Nama : Asri Ayu Arimetika
NIM : 222015065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NDM: 02161006902/944806

Welly, S.E., M.Si
NIDN/NDM: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 02161006902/944806

Abstract

Asri Ayu Arimetika / 222015065 / An Analysis of PSAP Application No. 71 Year 2010 in Improving the Performance of Accountability to Prevent Fraud toward Inspectorate of Municipality in OKU / Public Sector Accounting

This research is aimed at finding out the application of PSAP No.71 Year 2010 in improving the performance of accountability to prevent fraud toward Inspectorate of Municipality in OKU. This research was regarded as a descriptive research design in line with primary data and secondary data. The technique for collecting the data was through interviewe. The technique for analyzing the data was through a qualitative method. The results of this research showed that the application of PSAP No.71 Year 2010 had been good in improving the performance of accountability to prevent fraud toward Inspektorat of Municipality in OKU.

Keywords: PSAP, Performance Accountability, Fraud.

PENGESAHAN

NO. 365 / Abstract LB UMP/ VII / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang



ABSTRAK

Asri Ayu Arimetika/222015065/2019/Analisis Penerapan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja untuk Mencegah *Fraud* pada Inspektorat Kabupaten OKU/Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mencegah *fraud* pada Inspektorat Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mencegah *fraud* pada Inspektorat Kabupaten OKU sudah cukup baik.

Kata Kunci: PSAP, Akuntabilitas Kinerja, *Fraud*.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja untuk Mencegah *Fraud* (studi pada Inspektorat Kabupaten OKU)”. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, H.M.Nasril,S.E dan Hj.Mistilawati,S.E, yang telah mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat, dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Betri Sirajuddin,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Ibu Welly,.SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta saudara-saudara ku yang telah memberi semangat,

mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala serta pegawai/staf di Inspektorat Kabupaten OKU yang telah memberikan izin penelitian atas keperluan skripsi penulis.
6. Kepada seluruh keluargaku yang telah membantuku dalam berbagai hal sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang,.....2019

Penulis,

Asri Ayu Arimetika

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. PSAP Nomor 71 Tahun 2010.....	10
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	10

b. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	11
2. Akuntabilitas Kinerja	16
a. Pengertian Akuntabilitas Kinerja	16
b. Pengukuran Kinerja	16
c. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	17
d. Fungsi Pengukuran Kinerja.....	18
e. Tujuan Pengukuran Kinerja pada Sektor Publik	18
f. Permasalahan Pengukuran Kinerja Sektor Publik	19
3. <i>Fraud</i>	20
a. Pengertian <i>Fraud</i>	20
b. Jenis-jenis <i>Fraud</i>	20
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i>	22
d. Cara Mencegah <i>Fraud</i>	23
B. Penelitian Sebelumnya	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel.....	30
D. Data Yang Diperlukan.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	32
1. Analisis Data.....	32
2. Teknik Analisis.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Inspektorat Kabupaten OKU	34
2. Visi, Misi, dan Tujuan pada Inspektorat Kabupaten OKU.....	35
a. Visi.....	35
b. Misi.....	35
c. Tujuan	35
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas pada Inspektorat Kabupaten OKU.....	36
a. Struktur Organisasi	36
b. Pembagian Tugas.....	36
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Peringkat Tingkat Korupsi Negara-Negara di Asia Tenggara	2
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten OKU	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara di Inspektorat Kabupaten OKU
Lampiran 2	Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Fotokopi Lembar Persetujuan Skripsi
Lampiran 4	Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
Lampiran 5	Fotokopi Cap Dari Tempat Penelitian
Lampiran 6	Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Qur'an
Lampiran 7	Fotokopi Sertifikat TOEFL
Lampiran 8	Biodata Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang keuangan negara terdapat perubahan yang signifikan, yaitu perubahan dibidang akuntansi pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebabkan karena adanya tuntutan publik agar pemerintahan dikelola secara profesional dan efisien dengan membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama para aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini, karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik, dan pada upaya terciptanya *good governance*. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia saat ini termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah maraknya praktik *fraud* yang terjadi diberbagai instansi pemerintah.

Salah satu jenis praktik *fraud* yang dimaksud adalah korupsi. Praktik korupsi dalam pemerintahan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup dikawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel I.1 yang menunjukkan peringkat tingkat korupsi di Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara-negara didunia yang dikeluarkan oleh organisasi *Transparency International* pada tahun 2018.

Tabel I.1
Peringkat Tingkat Korupsi Negara-Negara di Asia Tenggara
Tahun 2018

Peringkat Negara	Negara	Skor IPK 2018
3	Singapore	8.5
61	Malaysia	4.7
89	Indonesia	3.8
99	Philippines	3.6
100	Thailand	3.4

Sumber: Corruption Perceptions Index, www.transparency.org, 2019

Korupsi (*fraud*) merupakan salah satu faktor yang paling berdampak luas dalam kemajuan bangsa Indonesia. Akibat dari korupsi (*fraud*) yaitu lambatnya pertumbuhan pembangunan yang akan berimplikasi kepada masyarakat, karena pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan secara maksimal, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi, karena masyarakat merupakan sasaran akhir dan fokus utama dari seluruh kegiatan pembangunan. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akibat adanya praktik *fraud* dapat dilihat dari laporan keuangannya.

Kasmir (2014: 7) menjelaskan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam

suatu periode tertentu. Isi dari laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan suatu ketidakwajaran jika terjadi kecurangan. Saat ini, reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah memasuki era transparansi dan akuntabilitas yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Format laporan keuangan yang disajikan pemerintah saat ini sangat berbeda dengan laporan keuangan yang lalu. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Penyusunan laporan keuangan saat ini berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan ini bermanfaat untuk memberikan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencegah *fraud* dilakukan oleh Urip dan Yohanes (2008) dengan judul “Pengaruh penerapan akuntansi sektor

publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah *fraud*'. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik secara partial maupun secara bersama-sama. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Reynaldi dan Nur (2011) dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada SKPD Rokan Hulu)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chairun, dkk (2013) dengan judul "Sistem pengendalian intern dalam pencegahan *fraud* pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Hafiez dan Rusdi (2013) dengan judul "Hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di pemerintah daerah". Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa faktor-faktor yang berhubungan secara positif dan implementasi sistem pengukuran kinerja untuk pengembangan sistem pengukuran

kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja adalah faktor organisasional.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan SAP dilakukan oleh Friska, dkk (2015) dengan judul “Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota Bitung.”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji .

Bagi para pengawas internal (*intern*) keuangan khususnya di daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten OKU, laporan keuangan berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Inspektorat Kabupaten OKU memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen, maupun segi pencapaian visi dan misi, serta program-program pemerintah.

Berdasarkan dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Dilihat dari segi pencapaian visi dan misi, serta program

pemerintah, Inspektorat Kabupaten OKU menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai badan pengawas *intern*, Inspektorat Kabupaten OKU juga tidak lepas dari pengawasan pihak *ekstern*, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak BPK melakukan pemeriksaan rutin terhadap instansi pemerintah. Pemeriksaan dilakukan setiap tahun dengan dua tahap pemeriksaan pada waktu yang berbeda. Dua tahap tersebut terdiri dari audit administrasi, dan audit keuangan.

Pada tahun 2013 dan 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Inspektorat Kabupaten OKU. Laporan hasil audit pada tahun 2013 menyatakan bahwa BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten OKU agar Inspektorat Kabupaten OKU memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Bendahara Pengeluaran SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) yang tidak tertib dalam mengelola kas tunai/uang, dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2016, laporan hasil audit menyatakan bahwa BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten OKU agar memerintahkan Inspektorat Kabupaten OKU melakukan pemeriksaan atas aset tetap untuk memastikan kepemilikan atas aset tetap tersebut. Pada tahun 2017, telah beredar berita tentang Inspektorat Kabupaten OKU yang telah dikonfirmasi keakuratan informasinya. Ari Susanto, AK.,MM.,CA selaku Kepala Inspektorat

Kabupaten OKU, mengatakan bahwa Inspektorat Kabupaten OKU masih kekurangan tenaga auditor sebanyak 45 orang, padahal tenaga auditor yang seharusnya tersedia sesuai kebutuhan sebanyak 48 orang. Tentu saja kurangnya tenaga auditor dapat mempengaruhi kualitas akuntabilitas kinerja yang ada di Inspektorat Kabupaten OKU.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa ada 12 standar akuntansi pemerintah yang harus diterapkan oleh suatu instansi pemerintah sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugas, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dalam memberikan pendapat, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan. Dari 12 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, Inspektorat Kabupaten OKU hanya menerapkan 6 standar akuntansi pemerintahan, yaitu PSAP Penyajian Laporan Keuangan, PSAP Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, PSAP Laporan Arus Kas, PSAP Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAP Laporan Operasional.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Penerapan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja untuk Mencegah *Fraud* (Study pada Inspektorat Kabupaten OKU).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan PSAP nomor 71 tahun 2010 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mencegah fraud (study pada Inspektorat Kabupaten OKU) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAP nomor 71 tahun 2010 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mencegah *fraud* (study pada Inspektorat Kabupaten OKU).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan tentang penerapan PSAP nomor 71 tahun 2010 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mencegah *fraud*.

2. Bagi Inspektorat Kabupaten OKU

Sebagai masukan yang berguna dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, dan menambah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.James, Hall dan Nina Setyaningsih(Ed.) (2007) *Audit dan Assurance Teknologi Informasi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- B.Herry Priyono (2018) *KORUPSI (Melacak Arti, Menyimak Implikasi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Chairun Nisak, Prasetyono, dan Fitri Ahmad Kurniawan (2013). Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. *Journal of Auditing, Finance and Forensic Accounting* 1(1): 2339-2886. <http://journal.trunojoyo.ac.id/jaffa/article/view/594>
- Cris Kuntadi (2015) *SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Danang Suyonto (2012) *Metodelogi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, dan Stanly Winylson Alexander (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA* 3(1): 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556>
- Hafiez Sofyani, dan Rusdi Akbar (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 10(2): 1829-8494. <https://www.neliti.com/id/publications/74176/hubungan-faktor-internal-institusi-dan-implementasi-sistem-akuntabilitas-kinerja>
- IBI, Ikatan Bankir Indonesia (2017) *Wealth Management Tata Kelola*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Gusti Agung Rai (2008) *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ifat Fauziah (2018) *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pamulang: ILMU.
- Kasmir (2012) *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Miftah Thoha (2017) *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Bendahara Pengeluaran SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Reynaldi Riantiarno, dan Nur Azlina (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Rokan Hulu). *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* 3(3): 2085-5214. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/421>
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Uma Sekaran, dan Roger Bougie (2017) *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Urip Santoso, dan Yohanes Joni Pambelum (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis* 4(1): 0216-1249. <https://media.neliti.com/media/publications/71982-ID-pengaruh-penerapan-akuntansi-sektor-publ.pdf>